

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “ Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dalam hal ini diamanatkan pada pemerintah untuk dapat memberikan akses pada masyarakat untuk mengenyam pendidikan guna mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Hal tersebut mempertegas kewajiban pemerintah dalam mengupayakan akses yang mudah bagi masyarakat dalam mengenyam pendidikan seperti tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan hal tersebut dapat dicapai jika ada akses yang baik bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan untuk melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia. Karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia untuk menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya (Kunaryo, 2000: 21).

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Seiring dengan bertambahnya penduduk yang tidak terkontrol mengakibatkan adanya masalah-masalah sosial, salah satunya di sektor pendidikan. Terutama dikalangan masyarakat kurang mampu, dimana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan untuk melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia. Karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia untuk menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya. Pendidikan dalam arti luas terkandung pengertian mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan jalan bagi masyarakat untuk dapat mengakses lebih jauh sektor kesehatan untuk mendapatkan hidup yang layak. Pemerintah sebagai penanggung jawab tertinggi dalam suatu negara tentunya harus memberikan akses yang dapat dijangkau dengan mudah bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan. (Kunaryo, 2000: 21).

Kabupaten ponogoro tepatnya di Desa Karangpatihan yang terletak pada sebelah barat Kecamatan Balong yang masyarakatnya berjumlah sekitar 5841 jiwa 1848 kepala keluarga tersebut ternyata memiliki sebutan yang unik dikalangan masyarakat luas. Hal ini dikarenakan banyak warganya yang

mengalami retardasi mental atau keterbelakangan mental. Sekitar 48 kepala keluarga, 98 jiwa warga Desa Karangpatihan yang mengalami keterbelakangan mental. Isu yang berkembang dari masyarakat sekitar adalah terjadinya perkawinan sedarah antar warga dalam satu kampung tersebut. Letak desa itu memang benar-benar terisolir dari kehidupan masyarakat luas. Belum lagi minimalnya tingkat kesadaran pendidikan masyarakat sekitar yang masih rendah. Setelah beberapa waktu lalu diliput oleh salah satu televisi swasta yang membahas tentang gambaran kehidupan dan aktivitas masyarakat Desa Karangpatihan, sebutan “Kampung Idiot” pun muncul dari masyarakat luas. apalagi ketika orang mendengar kata Ponorogo, maka persepsi masyarakat luas akan langsung mengarah ke Desa Karangpatihan yang terkenal dengan kampung idiotnya (Profil Desa Karangpatihan, 2014 ).

Desa Karangpatihan ini tingkat garis kemiskinan mencapai ini terjadi didasarkan banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai ketetapan pekerjaan sehingga masih banyak angka pengangguran didesa karangpatihan ini menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dientaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita simiskin, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat, oleh sebab itu fenomena yang terjadi banyak anak-anak yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi terhalang oleh beberapa factor salah satunya adalah biaya.

Beasiswa dapat diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi, penghargaan itu dapat berupa akses tertentu pada suatu instansi atau penghargaan berupa bantuan keungan. Murniasih (2009). Menurut Murniasih untuk Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) adalah beasiswa yang diberikan untuk peningkatan atau pemerataan dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar biaya pendidikannya sebagai akibat krisis ekonomi, terutama bagi mahasiswa yang berprestasi akademik.

Program beasiswa ini dilakukan sejak tahun 2017 dimana tujuan masyarakat desa yaitu membantu bagi anak-anak supaya lebih semangat lagi dalam mengejar cita-cita mereka. Dan program beasiswa yang dilakukan di desa karangpatihan ini dilakukan setiap tahunnya, setiap setahun sekali kepala desa karangpatihan melakukan penyerakan sertifikat beasiswa ini kepada anak-anak yang telah terpilih. Sedangkan sumber dana program beasiswa yang dilakukan desa karangpatihan ini dari Dana Sosial (UPK) dan dana desa. (Profil Desa Karangpatihan)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul ***“Implementasi Program Beasiswa Smart Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Beasiswa Smart Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Karangpatihan ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Dalam Program Beasiswa Smart Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Karangpatihan?

### **C. Tujuan Penelitian**

berdasarkan uraian latar belakang dan perumuskn masalah di atas, maka dalam kesempatan ini dapat disampaikan tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Program Beasiswa Smart Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Karang Patihan.
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Dalam Program Beasiswa Smart Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Karang Patihan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi perbandingan bagi penelitian selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada topik yang sama.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Bagi Pemerintahan

Sebagai masukan bagi Pemerintah Desa Dalam Program Beasiswa Bagi Masyarakat Kurang Mampu

b. Bagi Penulis

- 1) Memberi tambahan wawasan dan pengetahuan tentang Program Beasiswa Bagi Masyarakat Kurang Mampu.
- 2) Dapat menambah khasanah pustaka di Universitas Muhammadiyah Ponorogo Jurusan Ilmu Pemerintahan, sehingga dapat dipergunakan sebagai referensi pada penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

c. Bagi fakultas

Bagi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo, penelitian ini diharapkan akan bernilai sebagai bahan masukan bagi fakultas dan menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa dimasa yang akan datang.

**E. Penegasan Istilah**

Untuk memahami konsep dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut ;

1) Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004:64).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undangundang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:65)

Implementasi Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan

baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. (Riggs, 2005:54).

## 2) Beasiswa

Beasiswa dapat diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, penghargaan itu dapat berupa akses tertentu pada suatu instansi atau penghargaan berupa bantuan keuangan. Murniasih (2009)

Menurut Murniasih untuk Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) adalah beasiswa yang diberikan untuk peningkatan atau pemerataan dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar biaya pendidikannya sebagai akibat krisis ekonomi, terutama bagi mahasiswa yang berprestasi akademik. Adapun tujuan beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA) secara umum yaitu:

- 1) Meningkatkan Pemerataan dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar biaya pendidikan.
- 2) Mendorong dan mempertahankan semangat belajar mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan studi atau pendidikan tepat waktu. 3. Mendorong untuk meningkatkan prestasi akademik sehingga memacu peningkatan kualitas pendidikan.

## 3) Masyarakat Kurang Mampu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,



pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan (Nugroho, 2004:119). Suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha - usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Menurut Dunn (1999:103), proses implementasi kebijakan merupakan hal yang lebih penting dari seluruh rangkaian proses kebijakan. Hal ini karena tingkat keberhasilan suatu kebijakan akan ditentukan oleh kemampuan mengimplementasikannya, meski dalam prosesnya terdapat berbagai masalah yang kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dan intervensi dari berbagai kepentingan. (Massi, 2011)

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor, organisasi, prsedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kewajiban dalam

upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. (Budi Winarno, 2011: 147)

Van Meter dan Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai, tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu maupun kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu : 1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan. 2. Adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan. 3. Adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri. (Leo Agustini, 2008: 13)

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) yang mencakup; (1) Sejahtera mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group; (3) Sejahtera mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan; (4) Apakah letak dari sebuah program sudah tepat; (5) Kebijakan telah menyebutkan impelmentornya dengan rinci; dan (6). Sebuah program di dukung oleh sumber daya manusia. Selanjutnya variabel lingkungan implementasi (*conteks of policy*), yang mencakup (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang

berkuasa, dan (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas sasaran. (Suharsono, 2013)

Menurut Wibawa (1994) tahap implementasi kebijakan dapat dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang dimiliki *logika botton up* dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan, atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan disisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam artian penurunan alternative kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkret atau mikro. (Deddy Mulyadi, 2015: 47)

George C. Edward III dalam Subarsono (2015) mengemukakan ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. (Subarsono, 2015)

#### 1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

## 2. Sumberdaya

Tim implementor dan sumberdaya manusia juga berperan sebagai faktor penentu keberhasilan dari implementasi kebijakan publik. Sumberdaya tersebut dapat terwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Apabila sumber daya manusia yang menjadi faktor utama penentu keberhasilan tidak mencakupi maka proses implementasi kebijakan tidak akan berjalan maksimal. Adanya tim implementor kebijakan publik merupakan salah satu bentuk dari sumberdaya yang memadai

## 3. Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Disposisi adalah salah satu penentu keberhasilan dari implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dalam implementasi kebijakan banyak sekali yang tidak berhasil dalam implementasinya karena tim implementor tidak memiliki karakter disposisi yang baik. (Suharmo. 2013)

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang

penting dari setiap organisasi adalah prosedur operasi yang standart (SOP). Dalam pengimplementasian kebijakan perlu dibuat SOP (*Standar Operasional Procedur*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dan bertindak. Agar proses implementasi lebih teratur dan terarah karena sudah ada tahap-tahapan dalam proses implementasi kebijakan. (Deddy Mulyadi, 2015: 68)

## **2. Peraturan Tentang Program Beasiswa Bagi Masyarakat Kurang Mampu**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan untuk melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia. Karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia untuk menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya. (Waskito n.d.)

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 31 ayat (1) berbunyi "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dalam hal ini diamanatkan pada pemerintah untuk dapat memberikan akses pada masyarakat untuk mengenyam pendidikan guna mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Hal tersebut mempertegas kewajiban pemerintah dalam mengupayakan akses yang mudah bagi masyarakat dalam mengenyam pendidikan seperti tujuan yang

harus dicapai oleh pemerintah yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan hal tersebutnya dapat dicapai jika ada akses yang baik bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (Waskito n.d. 2014)

#### **G. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini, untuk memberikan kemudahan bagi peneliti untuk melakukan penelitian diperlukan suatu operasional yang dimaksud untuk menjelaskan indikator-indikator yang ditetapkan. Definisi operasional adalah unsur yang mengukur suatu variable atau petunjuk pelaksanaan suatu penelitian. Variabel ialah sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai.

Definisi operasional adalah penjabaran karakteristik berdasarkan sesuatu yang diamati merupakan kunci dari definisi operasional. Penjabaran karakteristik dapat dilakukan dengan melakukan observasi dan pengukuran secara cermat terhadap penelitian berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Program Beasiswa Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Definisi operasional digunakan

untuk memberikan gambaran pengukuran variabel penelitian dengan menggunakan indikato-indikato sebagai berikut:

1. Implementasi program beasiswa bagi masyarakat kurang mampu di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponogoro :

- 1) Kriteria masyarakat kurang mampu
- 2) Kriteria tingkatan sekolahan

2. Implementasi Kebijakan dapat di ukur dari indikator :

- 1) Keputusan Pemerintah Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
- 2) Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangpatihan
- 3) Tujuan dan sasaran program beasiswa
- 4) Pelaku pelaksana
- 5) Sasaran dan target pelaksana
- 6) Manfaat pelaksana
- 7) Sumber Daya Manusia
- 8) Pelaksanaan program beasiswa
  - a. Waktu
  - b. Kendalan

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian Diskriptif Kualitatif yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data di dapat dari naskah wawancara, catatan lapangan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Dengan penyusun teori dari bawah ke atas,

yaitu sejumlah data yang banyak dikumpulkan dan saling berhubungan.(moleong, 2014)

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan obyek sekaligus tempat dimana peneliti melakukan penelitian guna untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo penelitian ini dilaksanakan berdasarkan penyesuaian dengan topik penelitian yaitu “Implementasi Program Beasiswa Smart Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”.

## 3. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi lapangan untuk mengumpulkan data yang kemudian diolah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program Beasiswa Smart Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Data primer adalah data teks hasil wawancara dengan informan yang berupa rekaman video atau audio, catatan tertulis bisa juga berupa foto. Data sekunder adalah data yang sudah ada dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengar (Sarwono, 2006). Sumber data yang diperoleh peneliti dengan cara melalui wawancara dan pengamatan langsung lapangan, sedangkan data pendukung di dapatkan melalui dokumentasi dari sumber lain seperti artikel, surat kabar, media sosial dan lain sebagainya guna memperbanyak data.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi dari informan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi

##### 1. Observasi

Penelitian ini menggunakan metode observasi tidak langsung, dimana peneliti hanya mengamati kondisi lapangan tanpa terjun secara langsung.

##### 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.(Sugiyono, 2013).Wawancara merupakan penggalian informasi dengan melakukan Tanya jawab antara pewawancara atau *interviewer* dan yang memberi jawaban atau *interview*.

##### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang berupaya mengumpulkan data-data narasumber dari buku-buku, foto-foto yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### 5. Teknik Pemilihan Informan

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang lebih spesifik.Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dimana

peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data. Hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna. (sugiyono, 2013).

Teknik penentu informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan cara yang digunakan peneliti dalam menentukan informan. Dalam menentukan informan peneliti tidak memilih secara acak, melainkan dengan sengaja memilih informan peneliti yang dapat memberikan informasi sejelas-jelasnya dan mendalam. (sugiyono, 2013).

Dalam pengumpulan data dan informasi informan yang dipilih peneliti untuk dapat memberikan informasi terkait judul penelitian yaitu Implementasi Program Beasiswa Smart Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Informan yang dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan khusus sehingga mampu memberikan informasi dan data terkait Peran Pemerintah Desa Dalam Program Beasiswa Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. sehingga dipercaya sebagai narasumber peneliti. Maka demikian informan telah ditentukan oleh peneliti sebagai berikut:

a) Pelaksana Program Beasiswa

Sebagai penanggung jawab pelaksana program

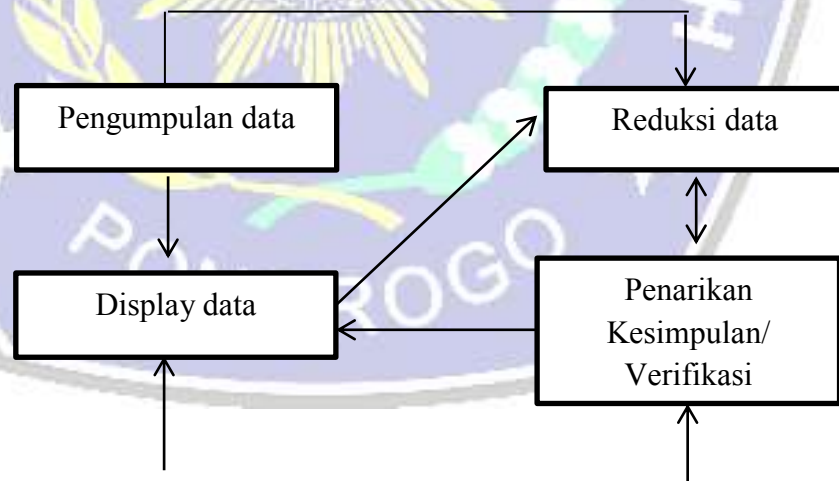
b) Kepala Desa Karangpatihan

Sebagai pelaksana program beasiswa bagi masyarakat kurang mampu.

## 6. Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban hasil wawancara apabila setelah dianalisis peneliti belum mendapatkan hasil maksimal maka peneliti dapat melakukan wawancara kembali sampai memperoleh hasil maksimal. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif. Aktivitas dalam analisis data ada 3 yaitu: 1. Reduksi data; 2. Penyajian data; 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi. (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2013)

Gambar 1.1  
Analisis Data Penelitian  
(Huberman dan Miles, 2009)



Model analisis seperti gambar diatas peneliti memiliki tiga kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus interaktif. Dengan adanya empat poin peneliti harus aktif selama pengumpulan

data dan penarikan kesimpulan (verifikasi) selama penelitian. Proses analisis penelitian ini dilakukan terus berulang dan terus berlanjut selama pengambilan data berlanjut sampai penelitian siap dikerjakan baru proses tersebut berakhir. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing proses pengumpulan data

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan data berupa kata-kata, foto, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan alat bantu, alat perekam dan alat pencatat. Proses pengumpulan data di awal harus melibatkan informan, aktivitas atau konteks terjadinya peristiwa. (Huberman dan Miles,2009)

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan pengolahan data kasar dari lapangan yang berlangsung dari awal sampai akhir, data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data dimaksud untuk menajamkan, menggolongkan mengarahkan dan membuang bagian yang tidak di butuhkan sehingga penarikan kesimpulan yang kemudian masuk keproses verifikasi data. (Huberman dan Miles,2009)

Tahap dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.tujuan utama dari penelitian

kualitataif adalah pada temuan. Oleh karena itu apabila peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola justru itulah yang harus dijakan perhatia peneliti dalam mereduksi data. (Huberman dan Miles,2009)

c. Penyajian data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data yaitu penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. (Huberman dan Miles,2009)

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat dan tidak mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Huberman dan Miles,2009)

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. (Huberman dan Miles,2009)

